



SEKOLAH RAKYAT PROGRAM AFIRMASI SEKOLAH BERMUTU DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Tumpal Daniel S¹, Juhaeriah²

^{1,2}STAI Darul Qolam

Email: rumpaldaniels@gmail.com, juhaeriah97@gmail.com

Abstrak

Sekolah Rakyat sebagai program afirmasi sekolah bermutu untuk golongan miskin yang gratis adalah investasi masa depan. Sasaran siswanya dari keluarga miskin pada kelompok desil 1 dan 2, yaitu dengan penghasilan delapan ratus ribu hingga dua juta rupiah per bulan, Sekolah Rakyat menyelenggarakan sekolah formal SD, SMP dan SMU. Tujuan lulusannya adalah berprestasi dan siap bekerja dan menjadi gamechanger (perubah keadaan) untuk memutus rantai kemiskinan pada keluarganya. Artikel ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif tentang efektivitas program afirmasi yang memberi akses keluarga miskin mendapatkan sekolah bermutu. Kesimpulannya didapati bahwa Sekolah Rakyat memenuhi standar sebagai sekolah bermutu dan gratis memerlukan peraturan yang lebih tinggi dari Instruksi Presiden (Inpres) sebagai landasan hukum penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Keywords: Sekolah Rakyat, Sekolah Bermutu, Miskin.

Abstract

The People's School, a free, affirmative action program for quality schools for the poor, is an investment in the future. Targeting students from poor families in deciles 1 and 2, with monthly incomes of between eight hundred thousand and two million rupiah, the People's School provides formal elementary, middle, and high school education. The goal is for graduates to achieve and be job-ready, becoming gamechangers, breaking the cycle of poverty in their families. This article uses a qualitative research approach to generate descriptive data on the effectiveness of the affirmative action program that provides poor families with access to quality schools. The conclusion is that the People's School meets the standards of a free, quality school and requires regulations higher than the Presidential Instruction (Inpres) as the legal basis for its implementation.

Keywords: People's School, Quality School, Poor.

I. Pendahuluan

Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses sekolah bermutu masih menjadi persoalan besar pendidikan di Indonesia. Data Biro Pusat Statistik (BPS) per September 2024 masyarakat miskin sebanyak 24,054.720 orang atau 8,57 persen dari penduduk Indonesia, BPS menggolongkan masyarakat miskin ke dalam empat golongan yaitu: Desil 1 sangat miskin, Desil 2 miskin, Desil 3 hampir miskin dan Desil 4 rentan miskin. Penggolongan Desil 1 sampai 4 adalah rumah tanggayang pengeluarannya per bulan antara Rp/ 500.000,- hingga Rp.3.000.000,-. Kondisi masyarakat miskin seperti ini berpotensi mereka tidak bisakeluar dari lingkarmiskinkanbla tidak ada kebijakan yang bersifat afirmasi dari Pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan. Pendidikan diakui secara empiris adalah cara yang efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Persoalan ada pada sektorpendidikan di Indonesia yaitu keterbatasan sekolah, beaya pendidikan yang mahal dan ketidakmampuan masyarakat miskin mengakses pendidikan apalagi pendidikan yang bermutu.

Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025 sebagai dasar penyelenggaraan Sekolah Rakyatadalah jawaban Pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem lewat sekolah bermutu dan gratis.. Presiden Prabowo menjelaskan tujuan dari program ini adalah memutus mata rantai kemiskinan dan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi terjebak dalam kondisi yang sama dengan orang tua mereka. Presiden menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga dengan pekerjaan sederhana, seperti pemulung, harus diberdayakan agar mereka tidak mengikuti jejak orang tuanya.

Menteri Sosial,Saifullah Yusuf pada peluncuran Sekolah Rakyat 14 Juli 2025 di Sekolah Rakyat Bogor menyatakan;"Sekolah ini bukan untuk anak yang pintar secara akademik, tapi untuk anak-anak yang selama ini terhambat

aksesnya ke pendidikan. Tidak ada tes akademik. Tesnya hanya administrasi dan kesehatan. Ini selektif, tapi adil, Saat pertama sekolah rakyat dimulau ada 63 sekolah yang dibuka, Sebanyak 9.755 siswa langsung tinggal di asrama yang dilengkapi fasilitas kebutuhan pendidikan yang lengkap. Kemensos menargetkan total siswa yang belajar di Sekolah Rakyat di tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 20 ribu osiswa, didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan,(news detik.com,2025/).

Aida Irawati,Staf Kepresiden mengungkap beberapa hasil penelitian tentang hubungan kemiskinan dan pendidikan (detik.com,kolom,2025):

“Tidak ada yang lebih memilukan selain melihat anak-anak Indonesia terpupus harapan masa depannya hanya karena terlahir dari keluarga miskin. Kemiskinan kerap menjadi lingkaran setan yang diwariskan antar generasi. Di tengah tantangan itu, pendidikan adalah jalan paling nyata untuk memutus lingkaran tersebut. Seperti kata Nelson Mandela, Pendidikan adalah senjata paling kuat untuk menghancurkan kemiskinan. Kita seharusnya bisa bersepakat bahwa kemiskinan tak boleh jadi takdir. Data BPS 2025 mencatat, lebih dari 25 juta warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dan sebagian besar berasal dari keluarga yang nyaris tak memiliki akses pendidikan layak. *Survey Indonesia Family Life* di 2014 menunjukkan 64,5% anak dari orang tua dalam kategori miskin akan tetap miskin di masa depan. Sejumlah penelitian menunjukkan korelasi erat antara pendidikan dan kemiskinan. Semakin lama seseorang bersekolah, peluangnya keluar dari kemiskinan jauh lebih besar. Bank Dunia (2021) bahkan mencatat bahwa peningkatan rata-rata lama

sekolah di Indonesia dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4 persen. Inilah yang menjadi pijakan utama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat mengggagas Sekolah Rakyat. Beliau selalu menekankan amanah UUD 1945 di bagian pembukaan bahwa negara wajib memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan salah satunya dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan. Sekolah Rakyat sebagai program transformatif bertujuan agar tak ada lagi anak Indonesia kehilangan akses pendidikan hanya karena faktor ekonomi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan, "Pendidikan adalah penentu apakah bangsa ini akan menjadi negara maju atau tetap miskin." Target Indonesia mencapai kemiskinan 0% dan pertumbuhan ekonomi 8% hanya mungkin tercapai jika setiap anak bangsa mendapat pendidikan berkualitas."

Prof.Dr. Mohammad Nuh, Ketua Tim Ahli Sekolah Rakyat yang juga mantan Menteri Pendidikan Naional, menerapkan Trilogi dari keberadaan Sekolah Rakyat,dalam wawancaranya denganBBC News ;

"Memuliakan sesuatu yang harus dimuliakan, Memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin dan Menjangkau sesuatu yang tak terjangkau. Sekolah Rakyat berkonsep berasrama dan gratis. Ini sudah melebihi daripada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti diketahui, akhir Mei 2025, MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMU, Karena niatnya kehadiran Sekolah Rakyat untuk memuliakan mereka yang tidak mempunyai golongan masyarakat

paling bawah untuk mendapatkan sekolah yang bermutu".

Namun ada juga yang tidak bersetuju dengan Sekolah Rakyat. Suara kritis itu, mengkhawatirkan potensi dualisme pendidikan dan menjadi pesaing sekolah negeri. Pemerintah memang harus membuka ruang dialog untuk penyempurnaan dan meyakinkan bahwa Sekolah Rakyat. bukan pengganti atau pesaing sekolah yang ada. Justru sebaliknya, ini adalah pelengkap untuk menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan yang selama ini sulit mengakses pendidikan bermutu. Stigma 'sekolah orang miskin' juga menjadi perhatian serius pemerhati pendidikan Keterlibatan dan dialog kepada para pihak memang diperlukan sejak awal, agar Sekolah Rakyat sebagai kebijakan afirmasi Pemerintah di bidang pendidikan ini, bersifat inklusif, ramah anak, dan tidak memberi ruang bagi diskriminasi dan bullying atau perundungan.

Pengenaan nama "Sekolah Rakyat" adalah simbol kehadiran negara di tengah rakyat, memastikan pendidikan bermutu bukan hanya milik segelintir orang, tetapi jugamilik keluarga buruh tani,pemulung, nelayan dan pekerja kasar lainnya di pelosok negeri, Sekolah Rakyat adalah jawaban atas harapan yang selama ini terasa jauh. Agar anak-anak mereka punya peluang mengenyam pendidikan layak tanpa terbebani beaya. Seperti pengakuan Naila, siswi kelas VI SD di Makassar. Ayahnya hanya seorang juru parkir dan ibunya bekerja serabutan. Naila mendaftar dan berhasil lolos menjadi penerima beasiswa Sekolah Rakyat. "Saya ingin jadi guru dan membantu orang tua. Semoga sekolah ini jadi jalan mengubah hidup kami," kata Naila penuh semangat, (kolom news.detik.com)

Kehadiran Sekolah Rakyat untuk memastikan setiap anak mendapat hak yang sama atas pendidikan bermutu, sebagai salah satu jalan untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang bukan sekadar komitmen tetapi wujud aksi membangun negeri yang sejahtera, adil,

dan setara. Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program ini, mendefinisikan Sekolah Rakyat sebagai sekolah berasrama yang seatus persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah ini terdiri dari jenjang SD, SMP dan SMU bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Calon siswa Sekolah Rakyat ditentukan dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS). Anak-anak dari desil 1 hingga desil 3 berdasarkan data tersebut menjadi calon peserta didik. Program afirmasi ini menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat setiap tahun agar setiap kabupaten di Indonesia memiliki minimal satu sekolah rakyat berasrama. "Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Dan ini saya yakin bisa kita kerjakan," tegas Presiden Prabowo. Pada saat acara Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat (<https://www.president.go.id,22/8-2025>)

II. Metode Penelitian

Artikel yang menjadi pembanding penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Winda Dwi Lestari dengan judul "Sekolah Rakyat: Jalan Baru Memutus Kemiskinan Lewat Pendidikan Gratis-Berkualitas" (Lestari, 2025). Disimpulkan Sekolah Rakyat bukan solusi ajaib, tetapi bisa menjadi titik awal dari perubahan sistemik. Kita butuh lebih dari sekadar angka partisipasi sekolah. Kita butuh keberanian politik untuk mengubah cara pandang terhadap pendidikan bahwa ia bukan beban anggaran, melainkan investasi sosial jangka panjang. Kedua, HM Zainuddin dalam artikel berjudul "Sekolah Rakyat", mengatakan bahwa "Ada dua pandangan yang kontras pada kondisi pendidikan kita. Di satu sisi masyarakat ingin berlomba mencari pendidikan yang bermutu, pada sisi lain mereka frustrasi karena soal

mahalnya biaya pendidikan dimaksud. Akhirnya ada sebagian masyarakat yang harus pasrah menerima kenyataan seperti itu. Dalam konteks ini, maka ada gap antara konsep ideal pendidikan kita dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Padahal jika kita memperhatikan rumusan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) ditegaskan, bahwa warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar", (Zainuddin, 2025)

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi program afirmasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bermutu dan gratis. Peneliti menggunakan metode yang dinilai tepat yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007).

III. Pembahasan

1. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah Gagasan Presiden Prabowo untuk Memuliakan Keluarga Miskin dan Memfasilitasi Kebangkitan Wong Cilik. Dengan visi "Mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan." Misinya "Memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan, menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air, menguatkan rasa percaya diri, berkarakter dan berbudi pekerti luhur". Dasar

hukum penyelenggaraan adalah Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Pengapusan Kemiskinan Ekstrem. Tindak lanjut Inpres No.8/2025, terbit Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 49/HUK/2025 dimuat dalam laman (sekolahrakyat.kemensos),merumuskan Sekolah Rakyat sebagai berikut:

- a) Sekolah Rakyat didirikan karena meningkatnya angka putus sekolah di berbagai jenjang pada tahun ajaran 2023/2024, berdasarkan laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 Badan Pusat Statistik (BPS).Serta data Kemendikbud pada Januari 2025 mencatat 730.703 siswa SMP dinyatakan lulus, tetapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.Tujuan jangka pendek Sekolah Rakyat adalah memberikan akses pendidikan dan penghidupan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan penguatan mental. Tujuan jangka panjang Sekolah Rakyat adalah investasi sosial (*social invesment*) dalam mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin guna memutus mata rantai kemiskinan dan menyiapkan generasi emas 2045.
- b) Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang secara tailor-made (khusus dan kontekstual), menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan dinamika sosial di lingkungan mereka.

Kurikulum ini menggabungkan pendekatan nasional dan kekhasan lokal, mencakup tiga muatan utama: Kurikulum Persiapan, Kurikulum Sekolah Formal, dan Kurikulum Asrama (Boarding).

- b.1. Kurikulum Persiapan (Learner Preparatoal). Tahap awal ini bertujuan melakukan *Talent Mapping* melalui assesmen kesiapan fisik, mental, dan akademik siswa. Ini menjadi fondasi kuat sebelum memasuki proses belajar yang lebih intensif.
- b.2. Kurikulum Sekolah Formal mengacu pada standar nasional, kurikulum ini mencakup: Intrakurikuler,Kokurikuler dan Ekstrakurikuler. Struktur ini mendukung pembelajaran akademik yang sistematis serta sesuai dengan regulasi nasional dari Kemendikdasmen, Kemendikristek, Kemenag, dan Kemensos.
- b.3.Kurikulum Sekolah Asrama merupakan bagian dari pendidikan karakter, kurikulum ini menguatkan nilai-nilai: Karakter kepemimpinan. Spiritualita,cinta tanah

air, bahasa dan komunikasi

Output kurikulum ini menghasilkan lulusan yang unggul dalam: Nilai akhlak dan keagamaan, karakter kepemimpinan, penguasaan bahasa dan literasi digital, entrepreneurship dan ketuntasan akademik. Didalam Sekolah Rakyat akan terdapat pendidikan formal dan pendidikan karakter. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional yang disesuaikan, untuk memberi fleksibilitas kepada siswa untuk memilih jalur belajar sesuai kebutuhan. Hal ini juga membantu mengakomodasi berbagai latar belakang dan kemampuan siswa dalam rangka mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Penyesuaian kurikulum nasional adalah model kurikulum yang dirancang khusus (*Tailor-Made*) dengan model pengelolaan: keluar-masuk ganda (*multi entry-multi exit*). Proses pendekatan pembelajarannya Individual Approach dan Pembelajaran Mendalam (*deep learning*). Adapun muatan yang terdapat dalam Kegiatan Pembelajaran yaitu: Intrakurikuler, Kokurikuler, Ekstrakurikuler, dan Sistem Asrama.

c). Ijazah Sekolah Rakyat. Ijazah setara dengan sekolah reguler dan umum, Karena pada dasarnya masih menggunakan Kurikulum Nasional. Mengacu pada 8 Standar penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi standar kompetensi keluaran/hasil yang telah diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional. Perbedaan hanya terdapat dalam proses implementasi program tersebut dilakukan menggunakan pendekatan dan sistem penanganan yang berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya.

d). Murid Sekolah Rakyat. Peserta didik Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yaitu kategori Miskin Ekstrem dan Miskin. Mereka dipilih secara selektif melalui proses seleksi yang adil dan transparan, serta telah mendapatkan izin resmi dari orang tua untuk mengikuti pendidikan berbasis asrama penuh (*boarding school*). Dengan pendekatan ini, Sekolah Rakyat memastikan akses pendidikan berkualitas diperoleh buat anak-anak dari keluarga miskin.

e). Guru Sekolah Rakyat. Tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dipilih dengan standar kualitas tinggi dan berasal dari berbagai jalur penugasan resmi, yaitu: Guru ASN yang ditugaskan oleh Pemerintah, Guru P3K Penuh Waktu yang sudah ditempatkan sesuai regulasi, Guru P3K Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diseleksi sebagai calon guru baru. Dengan komposisi guru yang profesional dan berkomitmen, Sekolah Rakyat menjamin proses pembelajaran berlangsung secara efektif, inspiratif, dan berorientasi pada perubahan sosial. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan, Sekolah Rakyat akan membutuhkan sebanyak 60.000 guru dengan mengikuti kurikulum sekolah unggul,

2). Program Afirmasi Pemerintah

Dalam Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Maret 2025 di Istana Merdeka Jakarta, Diketahui bahwa Sekolah Rakyat sebagai program afirmasi karena memang tidak ditemui nomenklatur sekolah rakyat di UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Sekolah Rakyat menyediakan sistem pendidikan bermutu lengkap dengan ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga. Sistem sekolah berasrama dan seluruh kebutuhan muridnya mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya gratis, bahkan Pemerintah memikirkan untuk bantuan orang tuanya.

Sekolah Rakyat adalah *affirmative policy* (kebijakan yang berpihak), mengapa butuh keberpihakan? Karena mereka yang menjadi sasaran kebijakan memiliki persoalan spesifik (pendidikan, kemiskinan, ekonomi, lingkungan sosial). Menggunakan pendekatan *Specific problems-specific solutions*, karena permasalahan mereka tidak sama dengan permasalahan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak bisa menggunakan pendekatan *common problems-common solutions*. Sekolah rakyat adalah bentuk penyetaraan hak atas akses terhadap pendidikan dan lingkungan pembelajaran yang bermutu. Sekolah Rakyat bukanlah bentuk deskriminasi/ pengkotak-kotakan, justru ini adalah bentuk negara hadir untuk memberikan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Bagi para siswa, “sekolah rakyat adalah deklarasi diri” bahwa mereka bisa mengubah nasib mereka dan mengubah kondisi keluarga. Bagi masyarakat miskin, “Sekolah Rakyat adalah peluang”, karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang menghendaki anak-anaknya hidup dalam keadaan susah dimasa depan. Bagi Pemerintah, sekolah rakyat adalah pembuktian, bahwa mata rantai kemiskinan bisa diputus melalui pendidikan. Bagaimana dengan anggarannya? Dana Sekolah Rakyat Pemerintah menyiapkan Rp. 100 miliar per lokasi yang dananya bersumber dari APBN dan dana CSR.

Prototype Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi pendidikan bermutu yang terjangkau dan inklusif,



3). Struktur Organisasi Sekolah Rakyat

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat berdasarkan Inpres No.. tahun 2025 bersifat kolaborasi dari beberapa kementerian

dan lembaga yang tersusun sebagaimana bagan di bawah ini :



Dalam struktur Sekolah Rakyat terdiri dari

a). Tim Pengarah

Pengarah: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Kantor Staf Presiden, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

b). Tim Pembina

Pembina: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Agama (Menag), Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Kementerian Keuangan (Menkeu), Menteri Pekerjaan Umum (MenPU), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (MenATR/BPN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB)

c). Penanggungjawab Operasional : Menteri Sosial

d). Tim Pengawas

Pengawas : Sekretariat Kabinet (Seskab), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Perindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Para Gubernur, Bupati dan Walikota

e). Tim Pelaksana

Pelaksana : Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Perwakilan Kementerian Terkait

f). Tim Ahli

Ahli : Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA dan Anggota.

4). Memutus Rantai Kemiskinan

Menurut Zainudin (uin-malang,2025),

”Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan (lihat Bab III pasal 5, 6 dan 7 UUSPN). Pertanyaannya kemudian, sudah meratakah pendidikan kita? Bagaimana dengan anak-anak miskin dan terlantar? Bagaimana dengan beaya sekolah yang semakin membumbung tinggi, sehingga tidak memberikan peluang bagi keluarga miskin, sementara anak-anak mereka memiliki kemauan keras dan mampu secara kualitas untuk bersaing, bahkan lebih cemerlang dari anak-anak orang kaya. Lantas masih perlukah pendidikan seperti sekolah? Bagaimana menghilangkan *image*, bahwa sekolah masih milik sekelompok tertentu dan jauh dari masyarakat

bawah? Di satu sisi kita ingin ada kompetisi dan seleksi masuk ke sekolah untuk mencari bibit-bibit unggul, di sisi lain bibit yang unggul tidak memiliki cukup dana untuk membayar biaya sekolah tersebut. Terpaksa mereka harus masuk sekolah yang di bawah standar. Bisa dibayangkan, bagaimana sekolah yang kondisinya tidak memenuhi syarat mampu mengangkat prestasi anak? Bisa dibayangkan, di negeri ini anak-anak berprestasi identik dengan anak-anak orang kaya, yang miskin tetap bodoh karena tidak ada peluang untuk ikut berkompetisi di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas cukup (baca: unggulan)?

Sepanjang pendidikan atau sekolah yang ada masih belum berpihak kepada masyarakat bawah (*the lower class*). Paulo Freire mengusulkan perlunya perubahan yang fundamental bagi terwujudnya pemihakan (*commitment*) di bidang pendidikan kepada rakyat miskin. Sementara Ivan Illih dan Everett Reimer dalam *Deschooling Society* lebih radikal lagi mengusulkan dihapuskannya segala bentuk lembaga sekolah. Meski Illih dan Reimer tersebut tidak realistis, tetapi setidaknya mampu menggugah para pengelola pendidikan untuk mengevaluasi konsep pendidikan yang berlangsung selama ini. Berbeda dengan Illih maupun Reimer, Johannes Muller masih menganggap bahwa sekolah masih menjadi alternatif yang terbaik. Hanya menurutnya, masalah yang harus segera diselesaikan adalah, bagaimana membentuk suatu sistem pendidikan yang secara institusional bisa merata dan mampu “memberantas” kemiskinan? Menurut Muller perlu reformasi sistem pendidikan yang menyangkut: *pertama*, perlunya diupayakan pemerataan pendidikan secara luas dan dalam jumlah yang memadai. Pemerataan dimaksud adalah memberi kesempatan kepada masyarakat lapis bawah, bahkan mereka harus mendapatkan *preferensi* supaya tidak terjadi

diskriminasi; *kedua*, Seluruh proses belajar-mengajar baik isi maupun penyampaian dan evaluasinya harus berorientasi kepada pemihakan rakyat miskin. Karena pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama: pemerintah, masyarakat dan keluarga (tri pusat pendidikan), maka dalam hal ini masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang populis dan berpihak kepada rakyat miskin. Ada kesan kuat dalam masyarakat, bawa sekolah unggulan dan bermutu adalah sekolah orang kaya karena mahal nyabiaya. Dengan demikian yang memiliki sekolah tersebut adalah mereka yang mampu membayar mahal (orang kaya), karena yang miskin tidak cukup beralasan untuk menempati sekolah unggulan tersebut. Kondisi demikian ini mengancam eksistensi pendidikan dan diskriminasi (Zainudin, Sekolah Rakyat).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. DESIL adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan (desatepus.gunungkidulkab), dimulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. DESIL terbagi menjadi 10 tingkat, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Desil 1: Sangat Miskin
- b) Desil 2: Miskin
- c) Desil 3: Hampir Miskin
- d) Desil 4: Rentan Miskin
- e) Desil 5: Pas-pasan
- f) Desil 6–10: Menengah ke atas (tidak diprioritaskan untuk bansos)

Kelompok dengan desil 1 sampai 4 adalah prioritas utama penerima semua jenis bantuan sosial, seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (BPNT), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Bansos lain dari Kemensos. Sementara itu, desil 5 masih dapat menerima sebagian bantuan, namun sifatnya terbatas dan

selektif berdasarkan asesmen. Untuk calon siswa Sekolah Rakyat Kementerian Sosial menetapkan desil 1 dan 2 adalah prioritas perekrutan siswa sekolah jalur afirmasi. Proses rekrutmen siswa juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial daerah, dinas pendidikan, hingga BPS. Seluruh data diverifikasi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang bisa masuk, yaitu anak-anak dari keluarga miskin yang berada di Desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

Pernyataan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan ratusan orang tua siswa Sekolah Rakyat di aula Pusdiklatbang Prof Margaguna, Jakarta Selatan. Dalam agenda bertajuk 'Sosialisasi dan Dialog Sekolah Rakyat Berasrama.

"Kalau ada anak dari keluarga miskin bisa masuk sekolah bagus, berasrama, dan diasuh dengan kasih sayang serta disiplin, itu bukan hanya urusan pendidikan. Itu pesan kuat bahwa negara tidak pernah abai, Sekolah Rakyat adalah ruang harapan, bukan belas kasihan. Agar anak tumbuh dengan rasa percaya diri karena merasa dihargai oleh negaranya. Kami ingin mereka berdiri tegak bukan karena dikasihani, tapi karena hak mereka dipenuhi. Dari sini, anak-anak akan tumbuh menjadi manusia merdeka yang tahu arah hidupnya, Sekolah Rakyat dikelola oleh para profesional dan mengedepankan ikatan kekeluargaan, sehingga orangtua diperbolehkan menjenguk anak-anaknya kapan saja. Dalam skema pengentasan kemiskinan ini, orangtua siswa juga dilibatkan. Mereka akan mendapat program pemberdayaan dan rumahnya yang tak layak huni bakal diperbaiki?".

Menteri Sosial menunjukkan video dalam dialognya tentang dua remaja bernama Ade dan Randi, warga Radio Dalam, Gandaria, Jakarta Selatan. Keduanya tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA karena keterbatasan ekonomi mengingat ayahnya hanya kuli bangunan. "Kisah ini mewakili banyak anak yang punya potensi, tapi terhenti di tengah jalan. Sekolah Rakyat adalah jalan untuk melanjutkan mimpi mereka, Komitmen Pemerintah membangun 100 Sekolah Rakyat setiap tahun untuk keluarga yang paling tidak mampu dengan menerapkan pendidikan harus sesuai bakat siswanya. Menurut Saifullah, anak tidak bisa disamakan. Burung jangan disuruh berenang, ikan jangan disuruh terbang. Maka Sekolah Rakyat akan memfasilitasi anak-anak sesuai keunggulannya, entah jadi pedagang, guru, chef, atau apa pun," jelasnya (news.detik.com).

Pengentasan kemiskinan adalah dampak jangka panjang dari keberadaan Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat dapat menutup pintu masuk potensi generasi berikutnya menjadi miskin, sekolah rakyat merupakan intervensi strategis jangka panjang dalam memutus transmisi kemiskinan antar generasi. Pengelolaan sekolah rakyat juga akan menumbuhkan perekonomian daerah sekitar dengan menyerap tenaga kerja, uang berputar untuk operasional sekolah rakyat, ekonomi daerah sekitar tumbuh dan kohesi sosial terjaga.

Sekolah Rakyat bukan hanya pendidikan gratis, ini investasi masa depan. Anak-anak dari keluarga miskin harus mendapat akses yang sama, dan ini pintu keluar dari ketergantungan bantuan jangka panjang. Dengan fasilitas penuh dan pendekatan pendidikan holistik, Sekolah Rakyat diharapkan bukan hanya mencetak lulusan berprestasi, tapi juga menjadi solusi jangka pendek untuk memutus siklus kemiskinan.

Anggaran Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025/2026 sebesar Rp 1,19

triliun. Anggaran tersebut masuk dalam pagu anggaran Kemensos sehingga total anggaran yang diperoleh bertambah menjadi Rp 80,79 triliun. Rincian anggaran Sekolah Rakyat sebagai berikut: Kurikulum Sekolah Rakyat sebesar Rp 3 miliar, rekrutmen dan seleksi guru Rp 119 miliar, operasional Sekolah Rakyat Rp 497 miliar, jaringan komunikasi dan data Rp 11 miliar, gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan profesi guru Rp 177 miliar, layanan sarana dan prasarana internal Rp 341 miliar, layanan perencanaan dan penganggaran Rp 900 juta, evaluasi dan bantuan Rp 1,59 miliar, manajemen Rp 10 miliar, layanan umum Rp 15,5 miliar dan audit internal Rp 3,4 miliar. (BBC News Indonesia)

5). Perbedaan Sekolah Rakyat dan sekolah biasa

ITEM PERBEDAAN	SEKOLAH BIASA (UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)	SEKOLAH RAKYAT (Inpres No.82025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Pengapusan Kemiskinan Ekstrem)
Kurikulum dan pendekatan belajar	Mengikuti kalender akademik nasional. Siswa hanya bisa mendaftar di awal tahun ajaran dan proses belajar berlangsung	Menggunakan Kurikulum Nasional seperti sekolah biasa. Namun, pendekatannya lebih personal dan fleksibel.

	secara kolektif, tanpa penyesuaian pada kondisi masing-masing siswa. (Bab X tentang Kurikulum, Pasal 36)	Sekolah ini menerapkan sistem <i>multi-entry</i> dan <i>multi-exit</i> , yang artinya siswa bisa masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajarnya masing-masing.
Biaya dan akses pendidikan	Sekolah negeri maupun swasta, umumnya hanya memberikan pembebasan biaya sebagian atau terbatas. Biaya tambahan seperti seragam, perlengkapan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler masih menjadi tanggungan orang tua. (Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat)	Biaya pendidikan 100 persen gratis, termasuk asrama, makan, seragam, dan kebutuhan dasar lainnya. Seluruh biaya ditanggung oleh negara.

	at dan Pemerintah)	
Target peserta didik	Terbuka untuk semua kalangan tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi secara spesifik. Seleksi masuk lebih fokus pada prestasi akademik atau zonasi wilayah (Bab V tentang Peserta Didik)	Menyasar anak-anak dari keluarga termiskin, yakni yang masuk kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bahkan, anak jalanan dan mereka yang tidak tercatat di Dapodik juga diprioritaskan
Fasilitas pendidikan	Tidak selalu memiliki fasilitas selengkap Sekolah Rakyat. Banyak sekolah negeri atau swasta yang bergantung pada kemampuan anggaran atau bantuan dari pemerintah dan masyarakat (Bab XII tentang Sarana dan	Dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti laboratorium, gedung serbaguna, fasilitas olahraga, dan asrama. Tujuannya agar siswa mendapat lingkungan belajar yang kondusif dan terintegrasi

	Prasarana Pendidikan)	
Tujuan pendidikan	Menekankan pencapaian akademik dan kesiapan siswa untuk jenjang pendidikan berikutnya, tanpa fokus khusus pada pemberdayaan ekonomi keluarga (Bab II tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan)	Visi Sekolah Rakyat adalah mencetak agen perubahan dari keluarga miskin yang mampu memutus rantai kemiskinan. Misi pendidikannya mencakup kepemimpinan, ketangguhan, dan penanaman nilai luhur
Seleksi siswa dan guru	Umumnya hanya seleksi akademik atau zonasi bagi siswa, dan guru ditentukan oleh kebijakan sekolah masing-masing (Bab V Peserta Didik dan Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Proses seleksi siswa di Sekolah Rakyat mencakup verifikasi data ekonomi, tes akademik, psikotes, pemeriksaan kesehatan, hingga pengukuran IQ. Guru yang mengajar pun diseleksi ketat oleh BKN dan Kemendikdasmen.

Pendanaan dan pengelolaan	Dikelola oleh Dinas Pendidikan daerah atau yayasan swasta. Pendanaan berasal dari pemerintah daerah, sumbangan masyarakat, atau biaya pendidikan dari orang tua (Bab XIII, Pasal 46,47,48,49 tentang Pendanaan Pendidikan)	Dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial dan guru direkrut oleh BKN dan Kemendikdasmen. Pendanaannya sepenuhnya berasal dari negara
---------------------------	--	--

memperoleh pendidikan yang bermutu”. Sejalan dengan pasal tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan untuk menggratiskan pendidikan dari SD hingga SMU atau sederajat. Pada posisi ini kebijakan afirmasi oleh Pemerintah diperlukan sebagai wujud kehadiran negara mengatasi diskriminasi kesempatan antara masyarakat kaya dan miskin untuk setara mengakses sekolah bermutu. Realitas sulitnya mengakses sekolah bermutu ada dua kendala, yaitu :

1. Kemiskinan menjadi penghambat utama bagi keluarga tersebut menyekolahkan anaknya pada sekolah yang bermutu, disebabkan mahalnnya biaya untuk mendaftarkan di sekolah tersebut.
2. Persyaratan akademik yang menjadi standar bagi peserta didik di sekolah bermutu, juga menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga miskin yang rerata diakibatkan kurangnya gizi sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan kognitif.

Peneliti merekomendasikan atas keberadaan Sekolah Rakyat sebagai hasil kebijakan afirmasi, yaitu sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Pengapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai dasar penyelenggaraan Sekolah Rakyat perlu diperkuat dengan memasukan porto folio Sekolah Rakyat pada revisi UU No/20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Sekolah Rakyat harus dipastikan benar sebagai sekolah bermutu dengan percepatan kemampuan keterampilan untuk memasuki dunia kerja sebagai prasyarat

Perbedaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan sekolah biasa mestilah terlihat dari *output* dan *outcome* hasil proses pendidikannya. Khusus untuk Sekolah Rakyat diharapkan efek jangka panjang atau *outcome*, minimal harus sudah terlihat dan dirasakan selama masa pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan afirmasi ini, berupa : Tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah dengan alasan apapun. Angka Partisipasi sekolah meningkat, Indeks Pembangunan Manusia meningkat. Indeks Modal Manusia meningkat, Daya saing masyarakat miskin meningkat dan Kemiskinan berkurang. Bila *outcome* nya terwujud, peneliti berharap, mestinya keberadaan Sekolah Rakyat tidak bersifat temporer, melainkan dapat berkelanjutan.

IV. Penutup

Amanat Pasal 5 ayat (1) UU No/20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) ditegaskan, “Setiap warga negaramempunyai hakyang sama untuk

pemutus rantai kemiskinan pada keluarga peserta didik.

Daftar Pustaka

Peraturan;

UU No.20 Tahun 2003,Sistem Pendidikan Nasional

Impres No.8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Pengapusan Kemiskinan Ekstrem.

Jurnal;

Irawati Aida,
<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7990788/sekolah-rakyat-jalan-baru-memutus-kemiskinan-lewat-pendidikan-gratis-berkualitas>.

Zainudin, Sekolah Rakyat, <https://uin-malang.ac.id/r/131101/sekolah-rakyat.html>

Website:

<https://sekolahrakyat.kemensos.go.id/>

https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7984672/ada-tambahan-100-sekolah-rakyat-baru-buka-tahun-ajaran-ini#goog_rewarded

https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7982746/rumah-calon-siswa-sekolah-rakyat-ini-akan-diperbaiki-ada-bantuan-senilai-rp-80-juta#goog_rewarded

<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7982733/siswa-sekolah-rakyat-tak-boleh-kerja-ortu-bakal-diberdayakan-plus-modal>

<https://news.detik.com/berita/d-7981902/momen-haru-dialog-mensos-dengan-orang-tua-siswa-sekolah-rakyat>

<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7987972/sekolah-rakyat-pakai-kurikulum-tailor-made-apa-maksudnya>

<https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/5654-Mengenal-DESIL--Penentu-Kelompok-Penerima-Bantuan-Sosial>

<https://news.detik.com/berita/d-8002136/kemensos-umumkan-100-titik-sekolah-rakyat-siap-beroperasi-bulan-ini>.

<https://news.detik.com/kolom/d-7998674/sekolah-rakyat-jalan-memutus-rantai-kemiskinan-lewat-pendidikan>.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/07/05/23483091/kisah-samuel-yawan-tinggalkan-jabatan-kepala-sekolah-negeri-demi-mengabdikan>.

<https://news.detik.com/berita/d-7997305/susanti-nangis-di-penutupan-retret-kepala-sekolah-rakyat-dulunya-ini-mimpi>.

BBC News Indonesia
<https://share.google/S91SihIhxc6xLmII0>

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20250714114518-569-1250395/ini-7-perbedaan-sekolah-rakyat-dan-sekolah-biasa-apa-saja>.

<https://www.president.go.id,22/8-2025>